**PENYELESAIAN SENGKETA HUTANG PIUTANG
DI KALANGAN MASYARAKAT TALOHEN HULU KELURAHAN AMPAH KOTA
KABUPATEN BARITO TIMUR**

Syarifuddin, Ahmad Dakhoir, dan Sri dewi nur azizah

ABSTRACT

Debt is one of the activities *muamalah* are allowed in Islam. Most people choose the wrong place when the event of default of borrowing and cause disputes often occur crime and immoral actions against the borrower. Unlike the case with accounts payable disputes that occur in society Talohen Hulu. The purpose of this study was to determine the background of the debts, the form of contract debts and settlement of disputes when the event of default (*wanprestasi*) in among community of Talohen Hulu village of Ampah City district of East Barito.

This study uses field research, the method used is descriptive qualitative approach. This research was conducted by collecting data that is direct observation, interviews, and gathering important documents. In addition it also examines Islamic books relating to debts that have been exacerbated by the arguments of the Qur'an and *Hadits*. The subjects consisted of 7 people (4 people of the debtor and the third person of the creditor).

The results of this study show that, the background of the debts is because Profession mostly rubber farmers whose income does not settle in less favorable circumstances did not quite meet other needs caused owes the motive for the sudden need (Purposes of transportation schoolchildren and venture capital). It thus is reasonable and permissible. Then the transaction occurred at home lenders to comply with the terms and the applicable rules of the creditors, the form of contract is *Qardhul hasan*. Disputes which amounted to 2 people can finally be resolved by way of principled deliberation kinship known as its unique Indigenous community *badamai banjar* previously occurred despite the ongoing conflict between the parties promise (contract).

Keywords: Debt, Default, Dispute, Deliberation.

A. Pendahuluan

Berbicara masalah ekonomi adalah hal utama dalam kehidupan sehari-hari manusia, namun dalam pemenuhannya setiap manusia mempunyai keterbatasan dalam hal demikian oleh sebab itu mereka memenuhi kebutuhannya dengan alternatif lain yaitu dengan cara berutang. Berutang diperbolehkan dalam Islam karena setiap orang mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Tiap masyarakat mempunyai tingkat sosial yang berbeda-beda pula dan sudah semestinya masyarakat yang tingkat ekonominya lebih tinggi mempunyai sikap empati terhadap masyarakat yang ekonominya lebih rendah dengan memberikan bantuan pinjaman ataupun hutang. Hutang Piutang ialah memberikan sesuatu kepada seseorang, dengan perjanjian ia akan membayar yang sama dengan itu. Misalnya mengutangkan uang Rp

2.000,00, akan dibayar Rp 2.000,00 pula.¹Anjuran untuk menolong termasuk di dalamnya dalam pemberian hutang Firman Allah SWT :

وَالْعُدُوْنَ اِلَّا تَمْرَعَلَى تَعَاوُنُوْا وَلَا وَالَّتَّقُوْا اِلَّا تَعَاوُنُوْا

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran"(Q.S al-Maidah (5):2).²

Tafsir Al-Qurthubi yang ditulis oleh Syaikh Imam Al-Qurthubi, maksud dari ayat tersebut adalah perintah untuk saling tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa ini merupakan perintah bagi seluruh manusia. Yakni, hendaklah sebagian kalian menolong sebagian yang lain. Berusahalah untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan mengaplikasikannya. Jauhilah apa yang Allah larang dan hindarilah. Allah juga mengeluarkan larangan-Nya, dimana Allah berfirman: "Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran-Nya."Ini merupakan ketentuan yang diperuntukan bagi dosa dan ukhwan, yaitu menzalimi manusia.³

Menurut peneliti: Ayat tersebut sudah jelas bahwa setiap manusia harus mempunyai sikap tolong menolong terhadap sesama dalam hal apapun salah satunya adalah dengan memberikan pinjaman atau hutang kepada pihak yang membutuhkan selama hal tersebut mampu untuk dilakukan. Namun bukan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran yaitu dalam halnya hutang yang di berikan sebagai jalan untuk memperoleh kepuasan individual atau meraup keuntungan tanpa memperdulikan kondisi orang yang dipinjamkan.

Akad hutang piutang memang telah diperbolehkan dalam Islam sebagai akad tolong menolong sesama masyarakat yang berada dalam kesulitan namun banyak sekali masyarakat yang salah dalam memilih tempat peminjaman atau tempat berutang karena ingin yang cepat, simpel dan praktis yang tidak berpikir panjang dampak kedepannya. Banyak masyarakat yang meminjam uang kepada pihak yang suka membungakan uang atau yang sering disebut sebagai rentenir yang akibatnya menyebabkan banyak masalah. Rentenir awalnya datang sebagai dewa penolong ramah, berpenampilan empatik terhadap calon peminjamnya namun pada akhirnya kerap sekali mencekik atau menjerat para nasabah yang meminjam uang kepadanya. Memang melakukan pinjaman kepada rentenir itu persyaratannya lebih mudah, cepat, tanpa menggunakan jaminan dan tidak ada pembatasan waktu berbeda dengan lembaga-lembaga keuangan baik bank maupun non bank, namun risikonya juga lebih berat dari pada meminjam di sebuah lembaga yang resmi. Banyak sekali tindakan kriminalitas atau kasus kekerasan oleh pihak rentenir karena masalah hutang bahkan menyebabkan pada kematian.

Praktik rentenir bukan hanya dapat merugikan warga secara individu namun juga merugikan negara karena warga masyarakat lebih banyak memilih melakukan peminjaman kepada pihak rentenir. Akibatnya aksi rentenir tersebut cenderung menjadi penghalang untuk mendapatkan akses bank secara langsung. Padahal rentenir atau pihak pemodal juga berkuasa

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet. XXIX, Bandung: Pt Sinar Baru Algesindo, 2006, hal. 306.

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Pt Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994, hal. 157.

³ Syaikh Imam Al-Quthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Cet. I, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, hal. 115.

terhadap penindasan rakyat kecil. Masyarakat Indonesia sudah sangat akrab dengan istilah rentenir atau juga biasa disebut sebagai lintah darat.⁴

Memang praktik rentenir sudah terjadi dimana-mana dengan tindakan yang tidak manusiawi namun berbeda halnya dengan apa yang terjadi pada masyarakat Talohen Hulu Kelurahan Ampah Kota dalam perjanjian hutang piutang. Masyarakat Talohen Hulu Kelurahan Ampah Kota Kabupaten Barito Timur adalah warganya yang terdiri dari 42 RT dari Kelurahan Ampah kota yang salah satunya adalah RT 28 Talohen Hulu yang terdiri dari 128 KK dan 450 Warga dan berprofesi sebagai petani dan juga pedagang.⁵ Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan wawancara sekilas dengan para pemodal (kreditur) dan juga peminjam (debitur) bahwa acapkali praktik utang piutang adanya perbuatan batil. Terlihat dari persentase yang ditetapkan maupun keuntungan yang diperjanjikan. Prosedur peminjaman adalah apabila pihak debitur memerlukan uang, ia harus mendatangi ke rumah pihak kreditur dengan mengatakan keperluannya, pihak kreditur akan memenuhi keinginan dari peminjam namun ia harus mematuhi aturan yang dibuat atau diperjanjikan di awal dan pihak kreditur juga setiap minggu atau bulannya mendatangi rumah-rumah peminjam untuk menagih pembayaran angsuran dan pokok pinjaman.

Adapun kisaran hutang piutang yang dipinjamkan dari pihak pemodal dari kisaran Rp 1.000.000-20.000.000 nominal tersebut cukup terbilang besar dan kepentingan uang yang dipinjam oleh pihak debitur adalah untuk keperluan anak sekolah dan modal usaha. Suatu ketika ada dari beberapa pihak debitur melakukan *wanprestasi* tidak terbayarnya angsuran persentase maupun keuntungan yang telah diperjanjikan karena ketidakmampuan dari pihak debitur menyebabkan pihak kreditur mengeluarkan perkataan yang kasar dengan pihak yang meminjam namun walaupun demikian si pihak kreditur tidak pernah menyita barang milik pihak debitur sekalipun dengan tunggakan pembayaran hutang dengan waktu yang cukup lama. Pihak kreditur hanya menagih saja agar uang yang dipinjamnya cepat dikembalikan pada akhirnya hal tersebut membuat kesadaran sendiri dari pihak debitur atau pihak meminjam untuk membayar hutangnya dengan cara menggadaikan barang yang ia miliki. Jadi masyarakat Talohen Hulu Kelurahan Ampah Kota Kabupaten Barito Timur pada dasarnya mempunyai khas tersendiri dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi. Permasalahan yang demikian membuat penulis tertarik dan mengkaji untuk melakukan penelitian dengan judul **"PENYELESAIAN SENGKETA HUTANG PIUTANG DI KALANGAN MASYARAKAT TALOHEN HULU KELURAHAN AMPAH KOTA KABUPATEN BARITO TIMUR."**

B. Landasan Teori

1. Konsep Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasadirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikanketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengansengketa.⁶

⁴Reza Karunia, *Mewaspada Lintah Darat dan Cara Pelaporan Rentenir* – Cermati, <https://www.cermati.com/artikel/mewaspada-lintah-darat-dan-cara-pelaporan-rentenir>, diakses pada tanggal 13 Juni 2016.

⁵Hasil wawancara dengan Bapak SG Ketua RT. 28 Talohen Hulu Kelurahan Ampah Kota Kabupaten Barito Timur (081351422347), Tanggal, 26 Januari 2016.

⁶<http://eprints.uny.ac.id/22029/4/4.BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 10 November 2016.

Penyelesaian sengketa ekonomi Syariah disebut sebagai alternatif penyelesaian sengketa merupakan pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di pengadilan.⁷ Adapun Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) sebagai berikut:

a) Musyawarah

Penyelesaian sengketa melalui musyawarah intinya adalah penyelesaian permasalahan secara dialogis antara kedua belah pihak yang bersengketa dengan mengutamakan asas kekeluargaan. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menyelesaikan sengketa melalui cara musyawarah untuk mufakat. Dengan penyelesaian sengketa bisnis dengan musyawarah, maka akan tetap terjalin hubungan kekeluargaan, dan silaturahmi diantara para pihak yang bersengketa (berselisih), serta lebih menghemat waktu dan biaya.⁸ Adapun dalil yang memerintahkan musyawarah yaitu sebagai berikut :

تَغْفِرْ عَنْهُمْ فَأَعْفُ حَوْلَكَ مِنْ لَا تَنْفُضُوا الْقَلْبَ غَلِيظًا كُنْتَ وَلَوْ لَهُمْ لَنْتَ اللَّهُ مِنْ رَحْمَةٍ فِيمَا
 ﴿الْمُتَوَكِّلِينَ تَحِبُّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ فَتَوَكَّلْ عَزَمْتَ فَإِذَا الْأَمْرِ فِي وَشَاوَرَهُمْ هُمْ وَأَسَ﴾

Artinya :”Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu.kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah.Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (Q.S Ali-Imran (3):159).⁹

b) Mediasi (*Ishlah*/□*hulh*/Perdamaian)

Secara umum mediasi dapat diartikan upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antara para pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat dengan kata lain, proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian memuaskan.¹⁰

Istilah bahasa Arab mediasi itu adalah □*hulh*.□*hulh* secara etimologis, berarti meredam pertikaian.Sedangkan menurut terminologi, pengertian shulhu, berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri.Perselisihan atau pertikaian antara dua pihak yang bersengketa secara damai.Upaya damai itu biasanya dilakukan melalui pendekatan musyawarah (*syura*) di antara para pihak yang berselisih.Cakupan objek perdamaian dari □*hulh* cukup luas, yaitu □*hulh* dalam *mu*‘□*malah* ekonomi, keluarga

⁷ Frans Hendra Wiranata, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hal. 15.

⁸ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Cet. I, Jakarta: SinarGrafika, 2013, hal. 252.

⁹Departemen Agama Republik Indonesia,*Al-Qur'an Dan Terjemahnya*,... hal. 103.

¹⁰Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Cet. II, Tangerang: PT Telaga Ilmu Indonesia, 2011, hal. 25.

(rumah tangga), peperangan dan perdamaian lainnya.¹¹ Dalil tentang perintah mediasi, di antara:

إِلَىٰ فَرْدُوهُ شَيْءٍ فِي تَنَزَّعْتُمْ فَإِنْ مِنْكُمْ أَلَّا مَرُؤًا إِلَىٰ الرَّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَٰلِكَ إِلَّا خِرَ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تَوْمِنُونَ كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولِ اللَّهُ

Artinya :”Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”Q.S An-Nisa (4):59¹²

c) *Tahkīm* (Arbitrase)

Perspektif Islam, kata dari “*arbitrase*” dapat dipadankan dengan istilah “*tahkim*.” *Tahkim* sendiri berasal dari kata “*hakkama*.” Secara etimologi, *tahkīm* berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum, *tahkīm* memiliki pengertian yang sama dengan *arbitrase* yang dikenal dewasa ini yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut dengan “*hakam*”.

Menurut Abu al-Ainain Fatah Muhammad, pengertian *tahkīm* menurut istilah fikih adalah:

“Sebagai bersandarnya dua orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridhai keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian para pihak yang bersengketa. Adapun menurut Said Agil Husein al-Munawar, pengertian “*tahkīm*” menurut kelompok ahli hukum Islam mazhab Hanafiyah adalah memisahkan persengketaan atau menetapkan hukum di antara manusia dengan ucapan yang mengikat kedua belah pihak yang bersumber dari pihak yang mempunyai kekuasaan secara umum. Adapun pengertian “*tahkīm*” menurut hli hukum dari kelompok syafi’iyah yaitu memisahkan pertikaian antara pihak yang bertikai atau lebih dengan hukum Allah atau menyatakan dan menetapkan hukum *syara*’ terhadap suatu peristiwa yang wajib dilaksanakan.”¹³

d) *Wilayat al-Qaḥḥa* (Kekuasaan Kehakiman)

Alternatif penyelesaian sengketa lainnya adalah *Wilayat al-Qaḥḥa* yaitu kekuasaan hakim yang terbagi menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut.¹⁴

1) *Al-ḥisbah*

Al-ḥisbah adalah lembaga resmi negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikannya. Menurut al-Mawardi

¹¹Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*,...hal. 253.

¹²*Ibid.*, hal. 158.

¹³Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama)*, Cet.II, Jakarta: Kencana, 2014, hal. 430.

¹⁴*Ibid.*,hal.434-436.

kewenangan lembaga *Hisbah* ini tertuju kepada tiga hal yakni: *pertama*, dakwaan yang terkait dengan kecurangan dan pengurangan takaran atau timbangan; *kedua*, dakwaan yang terkait dengan penipuan dalam komoditas dan harga seperti pengurangan takaran dan timbangan di pasar, menjual bahan makanan yang sudah kadaluwarsa; dan *ketiga*: dakwaan yang terkait dengan penundaan pembayaran utang bagi pihak yang berutang.

2) *Al-Madzhalim*

Badan ini dibentuk oleh pemerintah untuk membela orang-orang teraniaya akibat semena-mena dari pembesar negara atau keluarganya, yang biasanya sulit untuk diselesaikan oleh pengadilan biasa dan kekuasaan *Hisbah*. Kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat atau pejabat pemerintah seperti sogok menyogok, tindakan korupsi, dan kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat. Orang yang berwenang menyelesaikan perkara ini disebut dengan nama wali *al-Madzhalim* atau *al-Nadlir*.¹⁵

3) *Al-Qadha* (Peradilan)

Menurut arti bahasa *al-Qadha* berarti memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah berarti “menetapkan hukum syara pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat.” Adapun kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang berhubungan dengan masalah *al-ahwal asy-Syakhsiyah* (masalah keperdataan, termasuk di dalamnya hukum keluarga), dan masalah jinayat (yakni hal-hal yang menyangkut pidana).¹⁶

Orang yang diberi wewenang menyelesaikan perkara di pengadilan disebut dengan *qaḍhi* (hakim). Dalam catatan sejarah Islam, seorang yang pernah menjadi *qaḍhi* (hakim) yang cukup lama adalah *al-Qaḍhi Syureih*. Beliau mengaku jabatan hakim selama dua periode sejarah, yakni pada masa penghujung Pemerintah *Khulafaurrasyidin* (masa khalifah Ali Ibn Abi Thalib) dan masa awal dari pemerintah Bani Umayyah. Di samping menyelesaikan tugas-tugas perkara, para hakim pada pemerintah Bani Umayyah juga diberi tugas tambahan yang berupa penyelesaian perkara, misalnya menikahkan wanita yang tidak punya wali, pengawasan baitul maal, dan mengangkat pengawasan anak yatim.¹⁷

Melihat ketiga wilayah *al-Qadha* (kekuasaan kehakiman) sebagaimana tersebut, bila dipadankan dengan kekuasaan kehakiman di Indonesia, tampaknya dua dari tiga kekuasaan kehakiman terdapat kesamaan dengan Peradilan yang ada di Indonesia. Dari segi substansi dan kewenangannya, wilayah *Al-Madzhalim* bisa dipadankan dengan Peradilan Tata Usaha Negara, wilayah *al-Qadha* bisa dipadankan dengan lembaga peradilan umum dan peradilan agama. Adapun *wilayatul al-Hisbah* - secara substansi tugasnya mirip dengan polisi atau Kamtibmas, Satpol PP.¹⁸

2. Konsep Adat Badamai Masyarakat Banjar

¹⁵*Ibid.*

¹⁶*Ibid.*

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid.*

Adat Badamai adalah salah satu kebiasaan atau yang telah menjadi budaya masyarakat banjar dalam penyelesaian sengketa *non litigasi* (tidak melalui jalur pengadilan). Adapun lebih lanjut mengenai keterangan *Adat Badamai* sebagai berikut:

a). Pengertian Adat Badamai

Secara etimologis *adat badamai* merupakan kata majemuk yang berasal dari bentukan kata *adat* dan *badamai*. Istilah lainnya adat adalah *urf*, yang secara bahasa diartikan sebagai yang dikenal dan dianggap baik serta diterima oleh akal sehat. *Urf* juga diartikan sebagai tradisi yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan.¹⁹ Menurut *Ensiklopedi Hukum Islam* adat berarti kebiasaan atau tradisi masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun. Kata adat di sini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi, seperti hukum adat, dan mana yang tidak mempunyai sanksi seperti disebut *adat* saja.²⁰

Kata adat juga sebenarnya berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Pendapat lain menyatakan, bahwa adat sebenarnya berasal dari bahasa sang sengkerta *a* (berarti "bukan") dan *dato* (yang artinya "sifat kebendaan") dengan demikian, maka adat sebenarnya berarti sifat immateril: artinya, adat menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan sistem kepercayaan.²¹

Badamai berasal dari akar kata bahasa Banjar yang berasal dari kata *damai* yang berarti damai, tenang sejahtera. Kata *badamai* merupakan kata bentukan dari bahasa Banjar. Istilah ini berasal dari akar kata *damai* ditambah imbuhan (ber) menjadi *berdamai*, dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* damai sepadan dengan kata *as-sulh*, yang artinya akad untuk menyelesaikan suatu persengketaan atau perselisihan menjadi perdamaian. Pengertian yang lain ialah upaya yang dilakukan secara damai dan di dalam bahasa Banjar kata *badamai* dipadankan dengan kata berjalan dengan *bajalan*, bermain dengan *bamain*.²²

Adat badamai merupakan kata majemuk yang berarti suatu upaya perdamaian yang dikerjakan atau dilakukan secara berulang-ulang dan menjadi suatu kebiasaan yang melembaga pada masyarakat Banjar. Adat *badamai* dapat meningkat menjadi hukum adat, ketika masyarakat sudah menganggap perbuatan *badamai* itu sebagai suatu hal yang mesti berlaku pada masyarakat adat Banjar, karena itu sebagai suatu yang mesti dilakukan.²³

Adat badamai adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang lazim dilakukan oleh masyarakat Banjar. Adat *badamai* bermakna pula sebagai hasil proses perembukan atau musyawarah dalam pembahasan bersama dengan maksud mencapai suatu keputusan sebagai penyelesaian dari suatu masalah. *Adat badamai* dilakukan dalam rangka menghindarkan persengketaan yang dapat membahayakan tatanan sosial.

¹⁹ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Cet. V, Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 1999, hal. 50.

²⁰ Ahmadi Hasan, *Adat Badamai (Penyelesaian Sengketa) Pada Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan*, <http://jurnal.iain-antasari.ac.id/index.php/al-banjari/article/view/414/319>, diakses pada tanggal 5 november 2016.

²¹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Cet. VI, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, hal. 70.

²² Ahmadi Hasan, *Adat Badamai (Penyelesaian Sengketa) Pada Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan*,...

²³ *Ibid*.

Putusan Badamai yang dihasilkan melalui mekanisme musyawarah merupakan upaya alternatif dalam mencari jalan keluar guna memecahkan persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Pada masyarakat Banjar jika terjadi persengketaan diantara warga atau terjadi tindak penganiayaan atau pelanggaran norma (adat) atau terjadi perkelahian ataupun pelanggaran lalu lintas, maka warga masyarakat berkecenderungan menyelesaikan secara badamai. Warga masyarakat enggan menyelesaikan sengketa itu melalui lembaga litigasi (jalur lembaga peradilan). *Adat badamai* ini diakui efektif dalam menyelesaikan pertikaian atau persengketaan. Sekaligus mampu menghilangkan perasaan dendam berperan menciptakan keamanan ketertiban dan perdamaian. *Adat badamai* ini lazim pula disebut dengan, *babaikan*, *baparbaik*, *bapatut* atau *mamatut*, *baakuran* dan penyelesaian dengan *carasuluh*.²⁴

b). *Adat badamai* dalam UU sultan Adam

Jika terjadi persengketaan ataupun Undang-undang Sultan Adam disebutkan dalam Pasal 21:²⁵

Tiap kampung kalau ada perbantahan isi kampungnja ija itu tetuha kampungnja kusuruhkan membitjarakan mupaqt-mupaqt lawan jang tuha-tuha kampungnja itu lamun tiada djuga dapat membitjarakan ikam bawa kepada hakim.

Artinya: Tiap-tiap kampung bilamana terjadi sengketa, maka diperintahkan untuk mendamaikan (*mamatut*) dengan tetuha kampung, bilamana tidak berhasil barulah dibawa kepada hakim.

Pasal 21 UUSA sebagai dasar hukum *adat badamai* sampai kini tetap menjadi landasan norma dan perilaku dalam masyarakat Banjar. Bahkan sampai sekarang masih menjadi suatu tradisi *mamatut*. Tradisi penyelesaian sengketa yang sudah melembaga untuk merukunkan kembali setiap pertikaian, sehingga tidak terjadi perasaan dendam antara kedua belah pihak.

c). *Adat Badamai* Masyarakat Banjar

Masyarakat banjar mempunyai cara yang unik dalam kehidupan sosial mereka termasuk dalam permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat tersebut. Mochrani membagi penyelesaian sengketa itu kepada dua hal, pertama penyelesaian dalam masalah agama yaitu dengan cara mengadakan *hujjah* dan kedua penyelesaian konflik yang bersifat fisik yang berkaitan dengan kasus penganiayaan, perkelahian, pelanggaran lalu lintas maupun sengketa pembagian harta warisan. Jika terjadi konflik atau persengketaan antara warga dan tidak dilakukan *adat badamai* diyakini akan merusak tatanan harmoni yang merupakan pelanggaran terhadap kearifan tradisional.²⁶

Jika konflik terjadi apalagi yang berkaitan dengan peristiwa pidana, maka tokoh-tokoh masyarakat (tetuha kampung) berinisiatif untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Diupayakan pertemuan (*musyawarah*) keluarga, dilanjutkan acara selamatan, dengan bermaaf-maafan dan terkadang disertai dengan perjanjian tidak akan memperpanjang sengketa dan permusuhan. Bahkan diantara kedua belah pihak diikat dalam sebuah persaudaraan yang lazim disebut sebagai *baangkat dangsanak* (dipersaudarakan) atau *baangkat kuitan* (menjadi orang tua dan anak angkat). Ciri khas

²⁴ Ahmadi Hasan, *Adat Badamai (Penyelesaian Sengketa) Pada Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan,...*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

yang membedakan adat badamai dengan penyelesaian damai pada masyarakat lainnya adalah : adanya nilai-nilai atau norma yang harus dipatuhi, adanya upacara yang mengiringi sebagai simbol tuntasnya sengketa atau pertikaian, adanya acara maangkat dangsanak atau maangkat kuitan (dipersaudarakan) yang sarat dengan unsur-unsur ritual yang bersifat religi semisal adanya upacara *batapung tawar*. Lengkap dengan hidangan nasi ketan dan kelapa parut yang dicampur dengan gula jawa. Hukum *Adat Badamai* pada masyarakat Banjar terdiri atas 3 unsur, yaitu:²⁷

- 1). Unsur-unsur yang tidak tertulis, berupa kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam praktek pergaulan hidup dalam masyarakat. Ini mencakup segala apa saja yang sudah terbiasa dianggap baik oleh masyarakat dan akan menimbulkan reaksi dari berbagai lapisan masyarakat kalau hal tersebut dilanggar. Tegasnya pelanggarannya akan mendapatkan sanksi minimal berupa celaan dari masyarakat. Kebiasaan demikian dalam masyarakat Banjar berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya terutama dilihat dari besar kecilnya pengaruh pendidikan dan modernisasi serta kegiatan pembangunan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah.
- 2). Unsur-unsur yang berasal dari hukum Islam, yaitu mencakup segala ketentuan syariat islam dan hukum-hukum fiqh yang dipertahankan dan dianut oleh masyarakat sebagai bagian besar dari ajaran agamanya. Berkenaan dengan ini penentuan apa yang merupakan ajaran agama adalah tergantung pada persepsi warga masyarakat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ulama di daerah ini sejak zaman dahulu. Penentuan sesuatu adalah wajib, sunat, mubah, makruh dan haram pada dasarnya ditentukan dari para ulama dan tetap dipegang terus sebagai kriteria penilaian ketika seseorang menghadapi fakta tertentu yang memerlukan penilaian.
- 3). Unsur-unsur yang berasal dari zaman kerajaan Banjar, untuk hal ini tidak ditentukan suatu ketentuanpun selain dari apa yang dinamakan Undang-undang Sultan Adam (1835) seorang Sultan yang terkenal alim dan dihormati oleh rakyatnya. Undang-undang yang terdiri dari atas beberapa pasal ini kelihatannya pelaksanaannya sangat tergantung pada Sultan, sehingga sepeninggal Sultan Adam lebih-lebih lagi setelah meninggalnya Sultan Adam kurang banyak mendapat perhatian kecuali dalam bidang hukum pertanahan yang masih ditaati oleh masyarakat.

C. Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang di Kalangan Masyarakat Talohen Hulu Kelurahan Ampah Kota Kabupaten Barito Timur

Masalah hutang piutang tidak bisa terhindarkan dalam kehidupan masyarakat. Seseorang melakukan pinjaman ataupun hutang piutang karena ada yang melatarbelakanginya sehingga hutang sebagai alternatif baginya seperti apa yang terjadi pada masyarakat Talohen Hulu Kelurahan Ampah Kota berdasarkan observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Ibu RM, JT, SR dan RA bahwa motif berutang adalah untuk keperluan transportasi anak sekolah dan modal usaha. Hal tersebut merupakan alasan berutang termasuk dalam kebutuhan mendadak dan diperbolehkan selama tidak ada ayat yang melarang dan tujuannya adalah untuk hal yang baik pula. Pihak kreditur atau pemberi pinjaman

²⁷*Ibid.*

berdasarkan keterangan Ibu KR, LH dan Bapak DR juga berempati dengan memberikan bantuan pinjaman terhadaparganya. Ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam (Q.S al-Maidah (5):2):

وَالْعُدْوَانِ إِلَّا تَمْرَعَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا وَالْتَقَوَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوُنُوا

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”²⁸

Tafsir Fi Zhilalil Qur'an yang ditulis oleh Sayyid Quthb maksudnya adalah bahwa Islam menetapkan agar orang yang beriman tolong menolong dan bantu membantu dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan saja, tidak boleh bantu membantu dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Al-Quran menakut-nakuti jiwa manusia terhadap azab Allah dan menyuruhnya bertakwa kepada-Nya, agar dengan perasaan-perasaan seperti ini dia dapat menahan kemarahan dan taat aturan, berperangai luhur dan toleran. Takwa kepada Allah dan mencari ridha-Nya.²⁹

Secara eksplisit ayat tersebut menjelaskan bahwa anjuran untuk tolong menolong terhadap sesama dan hal tersebut sudah dilakukan oleh masyarakat Talohen Hulu terkhusus pihak kreditur (pemberi pinjaman) kepada yang membutuhkan. Namun sambungan dari ayat tersebut juga dilaksanakan oleh masyarakat Talohen Hulu yaitu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran yang merupakan larangan-Nya terbukti dari pernyataan Ibu LH, Bapak DR, Ibu JT, dan Ibu RM yaitu adanya penetapan persyaratan berupa keuntungan maupun kompensasi yang diberikan di awal perjanjian. Hal ini sudah tidak sesuai dengan konsep hutang piutang dalam Islam karena termasuk dalam kelebihan yang diperjanjikan baik dari pihak yang berutang maupun berpiutang adalah tidak boleh dan haram untuk diambil.

Hutang piutang yang terjadi pada masyarakat Talohen Hulu Kelurahan Ampah Kota berdasarkan observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan yaitu adanya rukun dan syarat tertentu dalam akad yaitu adanya Lafaz hutang piutang, Penetapan pembayaran persentase maupun keuntungan yang diperjanjikan baik secara perbulan maupun perminggunya, adanya penetapan persentasi maupun keuntungan yang diperjanjikan diawal akad, akad ditulis dalam bentuk kwitansi namun hanya nama dan jumlah nominal yang berutang, ada yang menggunakan jaminan namun ada juga yang tidak dan tidak menggunakan waktu tempo pembayaran pengembalian pinjaman. Akad ini merupakan akad *Qardhul Hasan* yaitu pinjaman yang lunak yang mana ketika pihak debitur kesulitan dalam pembayaran hutang masih ada toleransi yang mana barang milik pihak peminjam tidak pernah disita maupun ditarik oleh pihak kreditur.

Pada saat salah satu pihak melakukan *wanprestasi* atau tidak terpenuhinya janji berdasarkan keterangan Ibu SR dan RA kesimpulannya bahwa mereka pernah tidak dapat membayar hutang dengan jangka waktu yang cukup lama 6 bulan-1 tahun lebih alasan mereka tidak dapat membayar hutang karena usaha yang dijalankan mengalami kebangkrutan. Hal demikian membuat pihak kreditur menjadi emosi dan marah-marah yang menyebabkan terjadinya sengketa yang berkepanjangan antara kedua belah pihak yang berakad. Pihak kreditur terus menagih agar uangnya cepat dikembalikan akhirnya pihak peminjam yaitu Ibu RA melakukan pertemuan dan berbicara baik-baik musyawarah dengan

²⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*..., hal. 157.

²⁹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Cet. VIII, Jakarta: Gema Insani, 2013, hal.168-169.

prinsip kekeluargaan dalam penyelesaian sengketa tersebut, ini sesuai dengan alternatif penyelesaian sengketa yaitu jalur *non litigasi* (diluar pengadilan). Pola penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah berdasarkan prinsip kekeluargaan tersebut memang dianjurkan berdasarkan firman Allah SWT :

هُمُ وَاسْتَغْفِرْ عَنْهُمْ فَاعْفُ حَوْلَكَ مِنْ لَا نَفْضُ الْقَلْبِ غَلِيظًا كُنْتَ وَلَوْ لَهُمْ لَنْتَ اللَّهُ مِنْ رَحْمَةٍ فِيمَا
 ١٥٩ اَلْمُتَوَكِّلِينَ تَحِبُّ اَللَّهُ اِنْ اَللَّهُ عَلَى فَتَوَكَّلْ عَزَمْتَ فَاِذَا اَلَا مَرِي فِي وَشَاوَرَهُمْ ١

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Q.S Ali-Imran (3):159).”

Tafsir Al-Mishbah maksud dari ayat tersebut adalah berupa tuntunan yang diarahkan kepada Nabi Muhammad SAW. sambil menyebutkan sikap lemah lembut Nabi kepada kaum muslimin khususnya mereka yang telah melakukan kesalahan dan pelanggaran dalam perang Uhud. Sebenarnya, cukup banyak hal dalam peristiwa perang Uhud yang dapat mengundang emosi manusia untuk marah. Namun demikian, cukup banyak pula bukti yang menunjukkan kelemahan lembut Nabi SAW. Beliau bermusyawarah dengan mereka sebelum memutuskan untuk berperang, beliau menerima usul mayoritas mereka, walau beliau sendiri kurang berkenan; beliau tidak memaki dan mempersalahkan para pemanah yang meninggalkan markas mereka, tetapi hanya menegurnya dengan halus dan lain-lain.³⁰

Secara eksplisit bahwa ayat tersebut memang pada dasarnya ditunjukan untuk orang-orang yang bersengketa dalam perjanjian atau perikatan yang telah mereka buat, hendaklah mereka melakukan musyawarah terlebih dahulu sebelum ke ranah hukum yang lebih tinggi karena musyawarah memang dianjurkan dalam Islam dan merupakan sifat yang terpuji baik dalam kehidupan individu, masyarakat dan sebagainya. Apalagi masyarakat yang berada dilingkungan pedesaan maupun perkampungan yang harusnya mempunyai sikap *solidaritasterhadap* sesama. Penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah telah dipraktikan pada masyarakat Talohen Hulu ketika terjadi permasalahan dicari solusi bersama dengan prinsip kekeluargaan agar tidak terjadi keributan yang berkelanjutan dan tidak berlanjut sengketa pada pelaporan keranah hukum yang lebih tinggi. Cara penyelesaian sengketa dengan musyawarah dapat ditemukan solusi atas dasar kesadaran diri dari pihak peminjam seperti kasus Ibu SR bahwa kebun karet tersebut digadaikan kepada pihak pemberi pinjaman hutang sebagai pengganti hutang yang tidak dapat terbayarkan.

Cara penyelesaian sengketa musyawarah dengan prinsip kekeluargaan ini dikenal dengan istilah unik yaitu *adat badamaikarena* masyarakat Talohen Hulu kelurahan Ampah kota berdasarkan observasi yang telah peneliti lakukan bahwa masyarakat disana adalah komonitas orang banjar dan dalam penyelesaian permasalahanpun dilakukan dengan cara internal yaitu musyawarah kedua belah pihak dan solusi atas kesadaran tersendiri dari pihak

³⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah (Volume 2)*,....hal. 309.

peminjam dengan cara menyerahkan harta atau menggadaikan barangnya sebagai pengganti hutang yang tidak terbayarkan tanpa diminta maupun disita oleh pihak pemberi pinjaman. Pihak pemberi pinjaman hanya marah-marah saja kepada pihak peminjamnya dan menagih agar uangnya cepat dikembalikan namun tidak pernah sampai menyita maupun mengambil barang-barang pihak debitur atau peminjam. Pada intinya pihak peminjam menyadari bahwa hutang adalah perkara yang wajib untuk dibayarkan.

Adat badamai merupakan alternatif penyelesaian sengketa jalur *non litigasi* dan merupakan hukum yang tidak tertulis pada masyarakat Talohen Hulu terkenal dengan istilah kata “*babaikan, bapatut, bamaapan, baakuran dan baampihan*.” Ini sudah menjadi adat kebiasaan pada masyarakat Talohen Hulu jika terjadi sengketa khususnya pada akad hutang piutang hanya antara kedua belah pihak yang berakad saja tidak memuat adanya pihak ketiga sebagai *mediator* karena masih mampu diselesaikan secara baik-baik antara kedua belah pihak. Alternatif penyelesaian sengketa dengan cara *adat badamai* diyakini oleh masyarakat Talohen Hulu Kelurahan Ampah Kota dapat memperkuat tali persaudaraan antara pihak yang bersengketa dan dapat menghilangkan perasaan dendam.

Adat badamai pada masyarakat Talohen Hulu Kelurahan Ampah Kota sudah terjadi secara turun-temurun dari nenek moyang jaman dulu dan sudah menjadi warisan budaya luhur yang dapat menjadi acuan ataupun contoh untuk ditempatkan di zaman sekarang.

D. Penutup

Sengketa hutang piutang yang terjadi pada masyarakat Talohen Hulu Kelurahan Ampah kota diselesaikan dengan cara musyawarah prinsip kekeluargaan. Ini merupakan alternatif penyelesaian sengketa melalui jalur *non litigasi* (diluar pengadilan), cara musyawarah prinsip kekeluargaan ini dikenal dengan istilah unik masyarakat disana yaitu *Adat badamai* merupakan warisan budaya luhur masyarakat Talohen Hulu dalam penyelesaian permasalahan terkhusus dalam akad hutang piutang yang diyakini solusi dengan cara seperti ini dapat mempererat tali persaudaraan antara pihak yang bersengketa dan menghilangkan perasaan dendam diantara pihak tersebut. Ini merupakan cara yang dapat dicontoh dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sosial pada zaman sekarang.

E. Daftar Rujukan

Adi Nugroho, Susanti, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Cet. II, Tangerang: PT Telaga Ilmu Indonesia, 2011.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Pt Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994.

Imam Al-Quthubi, Syaikh, *Tafsir Al-Qurthubi*, Cet. I, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Cet. I, Jakarta: SinarGrafika, 2013.

Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama)*, Cet. II, Jakarta: Kencana, 2014.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Cet. XXIX, Bandung: Pt Sinar Baru Algesindo, 2006.

Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Cet. V, Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 1999.

- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Cet. VI, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Cet.VIII, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Wiranata, Frans Hendra, *Hukum Penyelesaian Sengkata*, Cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Ahmadi Hasan, *Adat Badamai (Penyelesaian Sengketa) Pada Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan*, <http://jurnal.iain-antasari.ac.id/index.php/al-banjari/article/view/414/319>, diakses pada tanggal 5 november 2016.
- <http://eprints.uny.ac.id/22029/4/4.BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 10 November 2016
- Reza Karunia, *Mewaspada Lintah Darat dan Cara Pelaporan Rentenir – Cermati*, <https://www.cermati.com/artikel/mewaspada-lintah-darat-dan-cara-pelaporan-rentenir>, diakses pada tanggal 13 Juni 2016.